

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi Jangka Menengah Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

4.1.1. Visi

Sebagai upaya mendukung dan mewujudkan Visi Jawa Barat dan program-program yang sedang dilaksanakan dan sebagai bentuk komitmen Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat maka ditetapkan visi BPMPT, yaitu : “ **Menjadi lembaga profesional dalam mewujudkan Jawa Barat sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia** “

Pengertian dalam Visi Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat adalah :

- Visi tersebut menunjukkan bahwa BPMPT Provinsi Jawa Barat harus bekerja secara profesional dengan kinerja terbaik yang berdampak pada kepuasan masyarakat dalam pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- Visi tersebut menunjukkan bahwa kinerja profesional BPMPT Provinsi Jawa Barat akan memberikan dampak jangka panjang yaitu mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah tujuan investasi terbaik di Indonesia bagi para investor.

4.1.2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan setiap organisasi dengan baik, menggambarkan dengan jelas akan tujuan suatu organisasi dan fokus pada sasaran yang ingin dicapai ke depan. Misi merupakan usaha mewujudkan visi dan merupakan penjabaran dari visi dimana kedua-duanya harus sejalan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Misi Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat

ditetapkan untuk mendukung dan mewujudkan Misi Provinsi Jawa Barat, yaitu :

Misi 1 : Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

Misi 2 : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

4.2. Tujuan dan Sasaran

4.2.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan hasil-hasil yang ingin dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dan ditetapkan dengan berpedoman pada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan harus konsisten dengan tugas dan fungsinya serta searah dengan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka merealisasikan misi.

Dengan mengindahkan Visi dan Misi organisasi serta berpedoman pada tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat menetapkan tujuan dari Visi dan Misinya, yaitu :

1. Misi Pertama : Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

Tujuan : Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat.

2. Misi Kedua : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan asas-asas pelayanan publik.

4.2.2. Sasaran

Memperhatikan sasaran yang telah ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat, Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu (BPMPT) Provinsi Jawa Barat merumuskan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi dalam 5 sasaran, yaitu :

Misi Pertama,

Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan.
 2. Meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama investasi untuk menarik minat investasi.
 3. Meningkatnya kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

Misi Kedua,

Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan.

- Sasaran :**
1. Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan.
 2. Meningkatnya kualitas sumber daya organisasi.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
BPMPPT Provinsi Jawa Barat

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Misi I: Meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat								
1.	Meningkatkan realisasi investasi PMA dan PMDN di Jawa Barat;	Meningkatnya kualitas data potensi dan peluang investasi yang siap ditawarkan	Jumlah proyek yang prospektif untuk ditawarkan	5 proyek	6 proyek	7 proyek	8 proyek	10 proyek
		Meningkatnya efektifitas promosi dan kerjasama investasi untuk menarik minat investasi	Jumlah minat investasi	4 investor	5 investor	6 investor	7 investor	8 investor
		Meningkatnya kualitas	Jumlah nilai investasi di	95,81 Trilyun	107,79 Trilyun	121,8 Trilyun	138,85 Trilyun	154,0 Trilyun

NO.	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				1	2	3	4	5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Jawa Barat						
Misi II : Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan									
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berdasarkan asas-asas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Indek kepuasan masyarakat	77,06	78,00	79,00	80,00	81,00	
		Meningkatnya kualitas sumber daya organisasi.	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Dasar Operasional Organisasi Dalam Mendukung Tupoksinya		70%	75%	80%	85%	90%
			Prosentase peningkatan Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur		70%	75%	80%	85%	90%
			Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana		65%	75%	85%	95%	95%
			Tingkat akuntabilitas laporan keuangan		60%	60%	70%	80%	90%
			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan		10 dok	10 dok	10 dok	10 dok	10 dok
			Tingkat Kesesuaian antara perencanaan dengan implementasi		70%	75%	80%	85%	90%

4.3. Strategi dan Kebijakan BPMPT

1.3.1. Strategi

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan, program operasional, dan kegiatan atau aktivitas dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi. Guna mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat, maka strategi yang akan dilaksanakan adalah :

1. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal dengan melibatkan seluruh stake holder.
2. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan perizinan terutama pengelolaan izin-izin strategis untuk mempercepat proses layanan dan akurasi pengendalian sektoral.
3. Memberikan layanan informasi potensi, prosedur pelaksanaan penanaman modal kepada investor melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya.
4. Memberikan layanan informasi perizinan kepada publik melalui media cetak, elektronik maupun media lainnya
5. Menjadikan Lembaga BPMPT sebagai area kinerja bebas KKN dan gratifikasi.
6. Melaksanakan peningkatkan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui diklat, seminar, *workshop*, bimbingan teknis dan lokakarya yang di dukung oleh OPD teknis terkait.
7. Menerapkan pola *online system* dalam upaya pendekatan pelayanan perizinan kepada masyarakat pemohon.
8. Melaksanakan peningkatan mutu pelayanan perizinan melalui penerapan sertifikasi ISO 9001-2008.
9. Melaksanakan sinergitas perizinan kewenangan Provinsi dengan OPD teknis terkait dan pemangku kepentingan.

10. Melaksanakan pemusatan database untuk meningkatkan pengendalian dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal.
11. Pemenuhan Sumber Daya Aparatur sesuai dengan standar kompetensi pegawai dalam pelayanan perizinan.
12. Mengoptimalkan sarana prasarana pendukung pelayanan perizinan.
13. Memperjelas Tupoksi dari Tim *Taskforce* Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal sebagai pendukung Pelayanan Penanaman Modal
14. Memperjelas Tupoksi dari Tim Teknis dari OPD terkait sebagai pendukung Perizinan Terpadu.

4.3.2. Kebijakan

Kebijakan berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi, sesuai dengan hasil analisa SWOT, dimana Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat perlu mengambil strategi dan memunculkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan yang agresif dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada organisasi untuk mendukung terhadap tujuan dan sasaran organisasi, maka kebijakan yang akan diambil yaitu :

1. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang penanaman modal yang andal dan profesional.
2. Meningkatkan kinerja aparatur di bidang pelayanan perizinan yang andal dan profesional.
3. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan perizinan yang memadai untuk mencapai SPM sesuai dengan alokasi anggaran.
4. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database potensi peluang investasi selain digunakan untuk pemangku kepentingan dan juga digunakan sebagai alat perencana, pelayanan, pengendalian dan pembinaan dalam meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.

5. Mengoptimalkan fungsi pemusatan database pelayanan perizinan kewenangan Provinsi Jawa Barat selain digunakan untuk pemangku kepentingan serta pembinaan oleh OPD Teknis terkait di Jawa Barat.
6. Menerapkan prosedur yang jelas dan meningkatkan standar mutu dalam pengelolaan pelayanan perizinan guna menciptakan transparansi dan menghindari terjadinya KKN.
7. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelayanan perizinan melalui koordinasi dan sinergitas pelayanan dengan OPD teknis.
8. Menciptakan peran aktif masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan perizinan terpadu agar sesuai tuntutan dan kepentingan masyarakat.
9. Meningkatkan pengolahan informasi penanaman modal untuk meningkatkan realisasi investasi di Jawa Barat.